

KARAKTERISTIK ORGANISASI LOKAL PEREMPUAN DAN KOMUNIKASI TERHADAP PEMBANGUNAN SOSIAL MASYARAKAT DI LHOKESEUMAWE-ACEH

Zulham

Universitas Malikussaleh, Lokseumawe-Aceh
Email: zulhambere@gmail.com

Fauzan

STAI Jamiatut Tarbiah Lhoksukon-Aceh.
Email: fznsyarifuddin@yahoo.com

Abstract: *The article discusses the role of women and it is characteristic in forming organizations and maintaining social communication establishment in order to actualize and articulate their existence within society. So far, we knew that gender's role during the new order regime, what we called Suharto's military regime, in which totally marginalized and isolated from development, politics, culture and other social activities. Therefore, the local communities in Aceh, has grown and developed organizations as a mechanism for fulfilling the needs and solving problems for the people at the local level, especially women.*

Keywords: organizations, women, communication and development

Abstrak: *paper ini membahas tentang peran perempuan dan karakteristik dalam membentuk organisasi dan mempertahankan pendirian komunikasi sosial dalam rangka aktualisasi keberadaan mereka di masyarakat, karena selama rezim orde baru, atau disebut dengan rezim militer Suharto, perempuan terpinggirkan dan terisolasi dari pembangunan, politik, budaya dan kegiatan sosial lainnya. Oleh karena itu, pada masyarakat lokal di Aceh, telah tumbuh dan berkembang organisasi-organisasi sebagai mekanisme pemenuhan kebutuhan dan pemecahan permasalahan bagi masyarakat pada tingkat lokal, khususnya perempuan.*

Kata kunci: organisasi, perempuan, komunikasi dan pembangunan

1. PENDAHULUAN

Pengalaman masa lalu telah memberikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia, bahwa pembangunan yang dilaksanakan dengan pendekatan *top-down* dengan sistem sentralistis, tidak berhasil di bidang sosial maupun politik; meskipun di bidang ekonomi cukup menggembirakan. Implementasi pendekatan dan pola pembangunan tersebut mengakibatkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, bukan dalam pengertian partisipasi, tetapi lebih pada dimobilisasi. Karena itu, kegiatan pembangunan makin menjadikan masyarakat

bergantung terhadap input-input dari negara. Masyarakat menjadi kurang memiliki jati diri, tidak aktif dan tidak progresif.

Secara sosial politik, dengan pendekatan *top-down* dan sistem sentralistis tersebut kebutuhan-kebutuhan warga terserap ke dalam kepentingan pemerintah, sehingga tidak timbul pemikiran imajinatif dari masyarakat sebagai pengawas partisipatif terhadap kebijakan negara pusat dan pemerintah daerah. Aktifnya masyarakat dalam pembangunan pasif diakibatkan oleh putus asanya sejumlah organisasi lokal yang dulu hidup di perkampungan, sebagai akibat campur

tangan pusat Jakarta yang terlalu dalam terhadap berbagai agenda kebutuhan kehidupan rakyat.

Respon terhadap pendekatan pembangunan tersebut, berkembang diskusi tentang *civil society* di kalangan perguruan tinggi maupun organisasi non pemerintah. Wacana *civil society* ini tampaknya menyadarkan para penyelenggara negara, untuk menemukan pendekatan baru dalam kebijakan pembangunan yang benar-benar berpihak pada kebutuhan rakyat, dengan mengedepankan demokratisasi dan hak asasi manusia. Berbagai seminar, semiloka dan *workshop* dilaksanakan oleh berbagai pihak untuk merumuskan model pembangunan yang mengakomodasi konsep *civil society* tersebut.

Terkait dengan wacana *civil society* ini berkembang pemikiran, bahwa untuk mewujudkan bangsa yang demokratis, harus dimulai dari bawah atau dari masyarakat akar rumput. Karena berdasarkan pengalaman, masyarakat bawah tersebut selama berabad-abad telah terjadi praktek-praktek demokrasi yang benar. Dengan demikian, apabila bangsa Indonesia berkeinginan terwujudnya pertumbuhan dan kesuburan demokrasi, bijak untuk mewujudkan kembali tentang kearifan lokal (*local wisdom*) yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat arus bawah.

Kota Lhokseumawe sebagai salah satu bagian administratif pemerintah Republik Indonesia, dimana Pemerintah Kota Lhokseumawe sekarang lagi kiat-kiatnya melakukan pembangunan pasca perdamaian Helsinki antara RI dan Aceh dan pasca bencana tsunami 10 (sepuluh) tahun.

Masyarakat dari akar rumput Kota Lhokseumawe seakan-akan telah menemukan jati dirinya untuk berpartisipasi membangun daerah. Gender adalah bagian yang terpenting dalam aspek pembangunan, dari sumber daya manusia, agama hingga aktivitas sosial, budaya dan politik. Pembangunan masyarakat madani dituntut penguatan keterlibatan dan peran perempuan. Marginalisasi gender sangat dirasakan pada periode orde baru, namun optimisme baru, muncul dengan eksisnya kesadaran perempuan akan termarginalnya kaum hawa, sehingga banyak muncul bentuk perlawanan kaum feminis ini dalam bentuk yang positif, seperti keterlibatan mereka dalam aktivitas organisasi sosial.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informasi dan data diperoleh dengan menggunakan observasi, wawancara dan studi literer. Teknik analisis menggunakan *Interaktif Model* dari Miles dan Huberman (Milles & Huberman, 1992. Pp 20), yang meliputi kegiatan, antara lain: peneliti mengumpulkan data baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder, setelah itu semua data yang sudah terkumpul tersebut selanjutnya ditampilkan ataupun disajikan. Data yang diperoleh dari lapangan maupun bahan pustaka pasti sangat beragam, untuk menyortir agar data yang diperoleh itu sesuai dengan kebutuhan maka selanjutnya dilakukan reduksi data. Reduksi data ini dimaksudkan agar data yang nanti akan menjadi bahan analisis tersebut adalah data yang benar-benar relevan dengan tema riset yang dilakukan. Jika reduksi

data telah selesai maka langkah selanjutnya adalah penarikan simpulan. Siklus ini dilakukan dengan siklus yang tidak terputus

3. PEMBAHASAN

Strategi pembangunan menentukan strategi komunikasi, maka makna komunikasi pembangunan pun bergantung pada modal atau paradigma pembangunan yang dipilih oleh suatu negara. Peranan komunikasi pembangunan telah banyak dibicarakan oleh para ahli, pada umumnya mereka sepakat bahwa komunikasi mempunyai andil penting dalam pembangunan. Rogers (1981) menyatakan bahwa, secara sederhana pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak dari suatu bangsa. Pada bagian lain Rogers menyatakan bahwa komunikasi merupakan dasar dari perubahan sosial.

Dengan demikian pembangunan di Indonesia dan Kota Lhokseumawe adalah dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia, harus bersifat pragmatik yaitu suatu pola yang membangkitkan inovasi bagi masa kini dan yang akan datang. Dalam hal ini tentunya fungsi komunikasi harus berada di garis depan untuk merubah sikap dan perilaku manusia Indonesia sebagai pemeran utama pembangunan, baik sebagai subjek maupun sebagai objek pembangunan.

Rogers (1981) melanjutkan komunikasi tetap dianggap sebagai perpanjangan tangan para perencana pemerintah, dan fungsi utamanya adalah untuk mendapatkan

dukungan masyarakat dan partisipasi mereka dalam pelaksanaan rencana-rencana pembangunan. Dari pendapat Rogers ini jelas bahwa setiap pembangunan dalam suatu bangsa memegang peranan penting. Dan karenanya pemerintah dalam melancarkan komunikasinya perlu memperhatikan strategi apa yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan sehingga efek yang diharapkan sesuai dengan harapan. Effendy (1987) mengatakan strategi baik secara makro (*planned multimedia strategy*) mempunyai fungsi ganda yaitu : 1) menyebarkan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif, dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal; 2) menjembatani "cultural gap" akibat kemudahan diperolehnya dan kemudahan dioperasionalkannya media massa yang begitu ampuh, yang jika dibiarkan akan merusak nilai-nilai budaya.

3.1. Urgensi Organisasi Lokal Perempuan di Indonesia dan Aceh

Sehubungan dengan itu, organisasi dan kearifan lokal, yang tumbuh dan berkembang di masyarakat lokal, perlu diberikan ruang gerak yang luas agar dapat mengekspresikan dan mengartikulasikan berbagai kebutuhan masyarakat lokal. Lebih jauh dari itu, berkembangnya keswadayaan masyarakat dan peran aktifnya dalam pembangunan, khususnya pembangunan kesejahteraan sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Korten (1985), bahwa pembangunan akan mampu mengembangkan keswadayaan masyarakat apabila pembangunan itu berorientasi pada

kebutuhan masyarakat (*people centered development*). Dan pembangunan yang berpusat pada masyarakat itu dapat direalisasikan apabila memanfaatkan organisasi lokal yang ada di masyarakat itu sendiri.

Pemikiran ini sesuai dengan Agenda 21 yang menekankan tanggung jawab khusus dari otoritas lokal dengan konsep “*berpikir global, bertindak lokal*”, dan deklarasi IULA (*International Union of Lokal Authorities*) dan EU (*European Union*) tahun 1985, dimana adanya keharusan bagi otoritas lokal di seluruh dunia memberikan prioritas untuk partisipasi bagi organisasi lokal, perusahaan swasta, perempuan dan pemuda, dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan implementasi proyek-proyek lokal dan perencanaan “Agenda 21” atau semua hal yang bersifat lokal (Bakht, 2001).

Dalam perspektif pekerjaan sosial, nilai sosial budaya dan organisasi lokal tersebut merupakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) atau modal sosial (*sosial capital*) dalam rangka pembangunan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan organisasi dan kearifan lokal tersebut memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan masyarakat. Sehubungan dengan itu, perlu dilakukan penelitian dalam upaya menemukenali profil dan peranan organisasi lokal.

3.2. Karakteristik Organisasi Lokal Perempuan di Kota Lhokseumawe.

Organisasi dapat didefinisikan secara sederhana sebagai suatu pengaturan orang-orang yang sengaja untuk mencapai tujuan

tertentu. Beberapa pengaturan tersebut sudah diketahui terjadi di banyak bidang. Misal pada organisasi lokal, instansi sekolah, pemerintahan, kampus, bank. Semua dapat dijumpai pada lingkungan kita sehari-hari. Terdapat empat karakteristik utama dari sebuah organisasi, yaitu: tujuan, kumpulan orang, struktur, sistem dan prosedur.

Setiap organisasi harus memiliki tujuan. Tujuan dicerminkan oleh sasaran-sasaran yang dilakukan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Tiga bidang utama dalam tujuan organisasi yaitu *profitability* (keuntungan), *growth* (pertumbuhan), dan *survive* (bertahan hidup). Ketiganya harus berjalan berkesinambungan demi kemajuan organisasi.

Sementara itu, setiap organisasi dimanapun dia berada pasti memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Karakteristik organisasi dapat didefinisikan adalah perilaku dan tingkah laku suatu organisasi/institusi terhadap kondisi yang ada diluar organisasinya, maupun di dalam organisasinya sendiri. Artinya organisasi yang ideal adalah organisasi yang bisa mensejahterakan anggotanya dan punya program kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya.

Karakteristik organisasi biasanya terdiri dari bentuk organisasi, keanggotaan organisasi, jangkauan wilayah kerjanya dan sumber dana organisasi tersebut. Demikian juga halnya dengan organisasi lokal yang ada di Kota Lhokseumawe, memiliki tujuan dan karakteristik yang berbeda-beda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, organisasi lokal yang dibentuk oleh kaum perempuan di

Lhokseumawe mempunyai karakteristik sebagai berikut:

Pertama, bentuk Organisasi Lokyang didirikan oleh gender Kota Lhoksemawe baik pada lingkup wilayah gampong (desa) maupun di perkotaan merupakan unsur dari organisasi lokal. Dilihat dari bentuknya, organisasi lokal ini cukup bervariasi seperti majelis ta'lim/pengajian/yasinan, penguyupan (pengumpulan) warga daerah, perkumpulan suku tertentu, perkumpulan remaja, perkumpulan adat, ikatan pemuda masjid, perkumpulan arisan, lembaga keuangan masyarakat, perkumpulan kesenian, perkumpulan olah raga, lembaga musyawarah adat, ikatan keluarga. Pemberian nama pada organisasi lokal tersebut dengan menggunakan nama khas tertentu misalnya saja "Perkumpulan Masyarakat AGARA" atau "Perkumpulan Mahasiswa-mahasiswi dan Pemuda Pasee" yang memiliki kegiatan menyatukan masyarakat dan pemuda Pasee (Kecamatan Samudera Geudong Kabupaten Aceh Utara) yang ada, baik itu yang masih berstatus pelajar dan kuliah di kampus-kampus yang ada di Kota Lhokseumawe, untuk dibina dan diarahkan oleh senior mereka yang berasal dari Pasee juga. Adapun cara pembentukan organisasi ada dua, yaitu *pertama*, berdiri sendiri secara alamiah berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat seperti perkumpulan pengajian, ikatan keluarga, ikatan kesukuan dan marga, kelompok arisan, kelompok kesenian dan olah raga dan adat. Organisasi ini cenderung adaptif dengan kemampuan lokal dengan mempertahankan dan melestarikan

nilai-nilai sosial budaya lokal, tradisi dan kebiasaan serta sumber daya lokal. *Kedua*, perkumpulan yang pembentukannya diprakarsai oleh pemerintah. Organisasi ini merupakan kepanjangan tangan pemerintah kepada masyarakat seperti PKK, Posyandu, IPHI dan sebagainya.

Kedua, keanggotaan organisasi lokal gender di wilayah Kota Lhokseumawe didasari pendidikan tertentu, keterampilan, persamaan agama, keturunan, persamaan suku, persamaan pekerjaan, kepedulian sosial, persamaan kepentingan, domisili di wilayah tertentu dan multikultur. Keanggotaan di dalam organisasi lokal pada umumnya bersifat sukarela, mempunyai hubungan interpersonal dan biasanya memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat. Organisasi lokal dengan anggota suku/etnis tertentu biasanya didirikan di pusat kota Lhokseumawe yang bertujuan sebagai ikatan kekerabatan diantara anggotanya, misalnya organisasi suku alas (kutacene), gayo, minang dan lain-lain. Menjadi anggota sebuah perkumpulan tidak sulit, biasanya melalui informasi dari keluarga, teman atau orang lain. Cara menjadi anggota biasanya langsung bergabung saja, ada yang mendaftar secara lisan dan ada pula yang harus mendaftarkan diri secara tertulis melalui formulir yang disediakan. Hak dan kewajiban anggota biasanya sudah dirumuskan dalam suatu organisasi dalam bentuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Hak dan kewajiban anggota diantaranya perkumpulan memiliki banyak persamaan antara lain hak untuk memperoleh pendidikan, mengikuti pengajian, memperoleh arisan, memperoleh

bantuan sosial dan mengikuti setiap kegiatan perkumpulan sedangkan kewajiban anggota antara lain menghadiri pertemuan rutin, iuran wajib, iuran sukarela, mengikuti arisan wajib dan mengikuti kegiatan perkumpulan secara aktif.

Ketiga, jangkauan wilayah, pada umumnya wilayah kegiatan organisasi di kota Lhokseumawe meliputi desa maupun di pusat kota. Hal ini sesuai dengan karakteristik dari organisasi, yang awal pendiriannya didasarkan pada tujuan memberikan pelayanan sosial dengan prinsip dari, untuk dan oleh masyarakat lokal. Namun demikian, dalam pelaksanaan kegiatan, ada diantara mereka yang sudah mampu mengembangkan jaringan kerja hingga sampai wilayah kecamatan atau kota/kabupaten lain. Sebagai contoh, perkumpulan arisan yang didirikan oleh kelompok masyarakat tertentu dari Provinsi Aceh dimana jangkauannya bisa sampai ke luar wilayahnya (kota dan kabupaten lain). Sedangkan tempat kegiatan dilaksanakan secara bergantian sesuai dengan kesepakatan anggotanya misalnya kegiatan pengajian dan arisan. Mengenai jangkauan wilayah ini sebenarnya bukan persoalan, karena memang begitu adanya. Pihak luar tidak bisa memaksakan bahwa organisasi mem-perluas jangkauan wilayah kerjanya, kalau memang komitmen para anggotanya menghendaki hanya pada wilayah tertentu. Lebih penting dari pada itu, bahwa organisasi dengan jangkauan wilayah tertentu tersebut, dapat membentuk dan mengembangkan jejaring kerja dengan organisasi lainnya, sehingga potensi yang ada pada mereka dapat

disinergikan untuk kepentingan sebuah program yang dampaknya menjangkau banyak orang.

Keempat, sumber dana, aktivitas perkumpulan perlu didukung oleh dana yang memadai sehingga kegiatan perkumpulan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan. Informasi tertulis dari berbagai lokasi/tempat, terdapat banyak kesamaan cara organisasi lokal dalam menghimpun dana, diantara lain:

a. Iuran anggota

Pada umumnya, anggota organisasi lokal menyumbangkan dana ke kas perkumpulan yang besarnya berkisar Rp. 2500 – Rp. 5000 per bulan. Dana ini ditangani oleh seseorang, dan dilaporkan setiap bulan pada saat pertemuan. Sumber dari iuran anggota ini, merupakan dana utama pada semua organisasi lokal, yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan rutin organisasi. Hal ini menggambarkan, bahwa organisasi lokal telah mampu secara swadaya membiayai program dan kegiatannya, tanpa harus bergantung pada pihak luar.

b. Sumbangan masyarakat

Secara insidental, organisasi lokal menerima bantuan dana dari masyarakat, baik diminta maupun tidak. Dana dari sumbangan masyarakat tersebut untuk membiayai program dan kegiatan yang sifatnya insidental, seperti peringatan hari besar nasional maupun hari besar keagamaan. Untuk mendapatkan dana

tersebut, pengurus mengajukan proposal kepada masyarakat dengan menyebutkan kegiatan yang akan dilaksanakan dan jumlah dana yang diperlukan.

c. Bantuan dunia usaha

Sebagaimana dana yang ber-sumber dari sumbangan masyarakat, secara insidental organisasi lokal menerima bantuan dana dari dunia usaha. Dana dari sumbangan dunia usaha tersebut untuk membiayai program dan kegiatan yang sifatnya insidental, seperti peringahari besar nasional maupun hari besar keagamaan. Untuk mendapatkan dana tersebut, pengurus mengajukan proposal kepada dunia usaha dengan menyebutkan kegiatan yang akan dilaksanakan dan jumlah dana yang diperlukan.

d. Subsidi pemerintah

Sebagian kecil organisasi lokal menerima bantuan dana dari subsidi pemerintah. Perkumpulan yang menerima subsidi pemerintah ini, adalah organisasi yang selama ini “menjadi kepanjangan tangan pemerintah”, seperti Posyandu, perkumpulan pemuda gampong dan IPHI daerah.

e. Hasil usaha organisasi (usaha ekonomis)

Sebagian kecil organisasi yang ada di Kota Lhokseumawe telah memiliki usaha ekonomis produktif, sehingga mampu membiayai program dan kegiatan yang dilak-sanakannya.

Bentuk usaha ekonomis produktif tersebut antara lain, memasarkan makanan/jajanan, kerajinan dan simpan pinjam. Organisasi yang demikian ini telah memperluas programnya pada kegiatan sosial, ekonomi, dan peningkatan keterampilan. Sementara masih banyak sekali organisasi lokal yang ada di Kota Lhokseumawe tidak memiliki unit usaha ekonomi produktif.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut, pada masyarakat akar rumput telah tumbuh dan berkembang organisasi yang dimanfaatkan sebagai mekanisme pemenuhan kebutuhan dan pemecahan permasalahan bagi ma-syarakat pada tingkat lokal, khususnya perempuan. Organisasi lokal telah mengembangkan organisasi dan program/kegiatannya yang mengakomodasi berbagai perbedaan dan kebutuhan masyarakat lokal. Sasaran bidang kesejahteraan sosial (penyandang masalah kesejahteraan sosial) sudah menjadi per-hatian sebagian besar organisasi perem-puan lokal yang ada di Lhokseumawe. Berbagai peranan telah dilaksanakan oleh organisasi sosial lokal, dan manfaatnya telah dirasakan oleh anggota dan masyarakat. Antar organisasi lokal telah mengembangkan jaringan dan telah membentuk embrio wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat. Di samping kaum perempuan telah mengembangkan kerjasama dengan pemerintah lokal dalam pembangunan masyarakat.

REFERENSI

- Bakhit, Izzedin, et.all (2001), *Menggempur Akar-Akar Kemiskinan (Attaking Root Poverty)*, Jakarta : Yayasan Komunikasi Masyarakat Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia.
- Effendy, Onong Uchjana, 1987. *Komunikasi dan Modernisasi, Alumni* : Bandung.
- Hettne, Bjorn, 1982. *Ironi Pembangunan di Negara Berkembang*, Sinar Harapan:Jakarta.
- Korten, David C (1985), *Pembangunan Berpusat pada Rakyat*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Milles, B. Matthew dan Huberman, A. Michael, 1992, *An Expandedn Soucers Book : Qualitative Data Analipsis* , Sage Publications.
- Rogers, Everett M dan Shoemaker, F Floyd, 1981. *Memasyarakatkan Ide-Ide Baru, Usaha Nasional* : Surabaya.